

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang makin lama makin pesat dan juga cepat pada zaman sekarang ini menuntut berbagai bidang untuk semakin berkembang, salah satunya yaitu di bidang ekonomi. Bidang ekonomipun mulai berbenah dan pada saat ini telah memunculkan suatu konsep yang baru yaitu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dengan menggunakan ide dan pengetahuan dari Sumber Daya Manusia (SDM). Ekonomi kreatif ini terdiri dari usaha dengan skala besar seperti perusahaan-perusahaan dan usaha dengan skala kecil seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia setiap tahunnya, juga turut meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Indonesia. UMKM mempunyai peran strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan, salah satunya yaitu dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian hasil pembangunan dengan cara berkontribusi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dan penggerak ekonomi masyarakat.

Peran UMKM dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia yaitu menghasilkan output yang berguna bagi masyarakat tak terkecuali UMKM yang terdapat di Kota Kudus yang tingkat pertumbuhan UMKM nya setiap tahun meningkat sebesar 3,4% per tahunnya dan dengan jumlah UMKM sebanyak

kurang lebih 15.300 (data Dinas UMKM 2018). Hal ini menjadikan UMKM di Kudus sebagai salah satu usaha penggerak ekonomi di daerah Kudus.

Namun disisi lain perkembangan UMKM yang semakin banyakpun juga menimbulkan beberapa masalah seperti pembiayaan, pengembangan usaha dan pengambilan keputusan. Sulitnya para pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan dan pengembangan usaha disebabkan karena para pelaku UMKM tidak dapat memberikan informasi terkait kondisi usahanya, sebab setiap aktivitas yang dilakukan UMKM memerlukan sebuah laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan usahanya selama satu periode akuntansi.

Banyak dari para pelaku UMKM yang merasa bahwa pelaporan keuangan tidaklah penting untuk usahanya dan pemahaman serta informasi terkait laporan keuangan yang mereka terima masih sedikit. Hal itupun menyebabkan sedikitnya penerapan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Padahal laporan keuangan sendiri akan memberikan banyak manfaat bagi para pelaku UMKM seperti membantu perencanaan usaha kedepannya, mengetahui seberapa banyak keuntungan ataupun kerugian yang mereka dapatkan dari hasil penjualan selama sebulan ataupun tiap tahunnya, serta memudahkan UMKM dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan tiap tahunnya, laporan keuangan juga digunakan untuk mengetahui posisi keuangan suatu UMKM sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Demi terwujudnya UMKM Indonesia yang maju, mandiri dan modern Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selanjutnya menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lebih sederhana dan tentunya lebih mudah dipahami dari

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada pertengahan tahun 2015. Dan selanjutnya mengesahkan SAK EMKM yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Hal ini menjadi bukti besarnya perhatian IAI untuk seluruh pelaku ekonomi, terutama UMKM. SAK EMKM ini sengaja dibuat sederhana agar menjadi Standar Akuntansi Keuangan yang mudah dipahami oleh sekitar 57,9 juta pelaku UMKM yang terdapat di Indonesia.

Banyaknya pelaku UMKM yang masih belum mampu dalam membuat dan menyusun laporan keuangan sesuai standar tersebut dipicu oleh beberapa hal diantaranya yaitu persepsi pemilik, pendidikan, sosialisasi, skala usaha dan lama usaha. Persepsi menurut Simamora (2002) didefinisikan sebagai cara pandang seseorang melihat sesuatu yaitu pandangan atau sebuah pengertian seseorang dalam mengartikan sesuatu hal. Secara formal persepsi adalah proses seseorang melakukan seleksi, mengorganisasikan, dan interpretasikan suatu hal ke dalam gambaran yang lebih luas (dunia) yang memiliki arti dan menyeluruh. Persepsi merupakan salah satu faktor penyebab penerapan SAK EMKM pada UMKM. Febriyanti dan Wardhani (2018) menyatakan bahwa persepsi berpengaruh positif dan signifikan pada penerapan SAK EMKM.

Pengertian serta definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana supaya peserta didik dapat secara aktif dapat mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia,

kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri dan keterampilan yang diperlukannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti dan Wardhani (2018) pendidikan berpengaruh signifikan dalam penerapan SAK EMKM, namun dalam penelitian Meidiyustiani (2016) tingkat pendidikan justru tidak berpengaruh.

Sosialisasi dapat dipandang sebagai suatu rangkaian belajar mengajar. Sosialisasi yang dilakukan berfungsi sebagai peran dalam satu peranan atau kedudukan tertentu yang adalah hasil dari rangkaian seseorang memperoleh sikap, keterampilan, dan pengetahuan (Kusuma dan Lutfiany 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti dan Wardhani (2018) sosialisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM, sedangkan dalam penelitian oleh Kusuma dan Lutfiany (2018) sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM.

Skala usaha merupakan besar kecilnya suatu usaha yang dapat dilihat dari penghasilan, serta modal usaha tersebut. Dalam penelitian oleh Meidiyustiani (2015) skala usaha memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerapan SAK-EMKM. Namun dalam penelitian oleh Adino (2019) skala usaha tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK-EMKM.

Umur usaha adalah lamanya usaha sejak didirikan hingga penelitian dilakukan. Umur usaha menentukan pola pikir perusahaan dalam bertindak dalam menjalankan operasional perusahaannya. Selain itu umur perusahaan juga menentukan kedewasaan pemiliknya untuk mengambil suatu keputusan (Soraya dan Mahmud 2016) Menurut penelitian Pratiwi dan Hanafi (2018) umur usaha

berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK-EMKM, sedangkan dalam penelitian Adino (2019) lama usaha tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK-EMKM.

Melihat peranan SAK-EMKM sangat penting terhadap keberlangsungan UMKM dan demi terciptanya UMKM yang maju, mandiri serta modern, maka para pelaku/pemilik UMKM di Kabupaten Kudus dapat mulai membuat dan menyajikan pembukuan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Di Kudus masih banyak UMKM yang masih belum menerapkan SAK-EMKM dalam pembukuannya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh para pelaku UMKM. Berikut ada beberapa hal mendukung terkait masih sedikitnya penerapan SAK-EMKM:

Pemerintah menyebut bahwa pembukuan keuangan usaha dinilai sebagai kunci sukses pembangunan UMKM. Bupati Kabupaten Kudus (plt) Hartopo, mengatakan bahwa UMKM harus naik kelas, karena dengan tingkat pertumbuhan UMKM yang semakin pesat pula. Namun disisi lain masih banyak pelaku UMKM yang harus ditingkatkan dalam hal pembukuan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan hanya sekitar 20% pelaku UMKM yang telah membuat laporan keuangan, dan pencatatannya masih secara manual. (Solopos.com)

Di kabupaten Kudus masih banyak sekali UMKM yang tidak melakukan pencatatan terkait aktivitas usahanya terkait keuangan, yang mana akan membantu proses pengelolaan usaha, hal itu kemungkinan terjadi karena para pelaku UMKM kurang memiliki pengetahuan akan akuntansi serta kesulitan dalam melakukan pencatatan. Kebanyakan pelaku UMKM masih melakukan pembuatan laporan

keuangan secara tradisional yaitu hanya mencatat arus uang masuk dan keluar dari usahanya. Ketika para UMKM masih kesulitan dalam laporan keuangan, maka akan menimbulkan permasalahan tersendiri untuk pelaku UMKM antara lain, tidak mengetahui peredaran uang dalam usahanya dengan pasti, kesulitan mengakses pinjaman, kesulitan menentukan dan menghitung pajak, serta tidak dapat mengambil keputusan secara tepat dalam kelangsungan usahanya.

Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sekitar 3,4% tiap tahunnya. Menurut Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM jumlah UMKM di Kabupaten Kudus mencapai 15.300 usaha. Oleh karena itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas UMKM baik secara produksi maupun manajemen diharapkan UMKM di Kabupaten Kudus dapat menerima Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM). Dimana standar tersebut ditujukan khusus untuk UMKM dalam membuat laporan keuangan, agar lebih mudah dan sederhana.

Terdapat beberapa hal yang membedakan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Febriyanti dan Wardhani (2018) dengan penelitian ini yaitu : perbedaan yang pertama adalah pada Penelitian sebelumnya terdapat 4 variabel yaitu persepsi (X1), tingkat pendidikan (X2) dan sosialisasi serta penerapan SAK EMKM sebagai variabel (Y), sedangkan dalam penelitian ini terdapat 6 variabel antara lain: persepsi (X1), tingkat pendidikan (X2), sosialisasi (X3), skala usaha (X4), lama usaha (X5) dan penerapan SAK EMKM (X6). Alasan penambahan

variabel tersebut dikarenakan adanya keragaman argumentasi hasil penelitian yang ada dan adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan yang terjadi.

Perbedaan yang kedua terdapat dalam objek penelitian. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah Kota Surabaya, lalu pada penelitian ini objeknya merupakan UMKM yang terdapat pada wilayah Kabupaten Kudus.

Sangat penting bagi para pemilik/pelaku UMKM untuk menerapkan SAK EMKM dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan yang dibuat. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, perlu dilakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI PEMILIK, TINGKAT PENDIDIKAN, SOSIALISASI, SKALA USAHA, DAN LAMA USAHA TERHADAP PENERAPAN SAK-EMKM PADA UMKM DI KABUPATEN KUDUS”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini adalah penelitian untuk melihat faktor-faktor seperti persepsi pemilik, tingkat pendidikan, sosialisasi, skala usaha dan lama usaha apakah telah mempengaruhi para pelaku UMKM dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM).
2. Penelitian ini mengambil objek penelitian pada UMKM yang terdapat di wilayah Kabupaten Kudus.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terkait masih banyaknya para pelaku UMKM yang belum membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, maka perumusan masalah yang ingin dikemukakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi pemilik berpengaruh terhadap penerapan SAK-EMKM?
2. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap penerapan SAK-EMKM?
3. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap penerapan SAK-EMKM?
4. Apakah skala usaha berpengaruh terhadap penerapan SAK-EMKM?
5. Apakah umur usaha berpengaruh terhadap penerapan SAK-EMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dikemukakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah persepsi pemilik berpengaruh terhadap penerapan SAK-EMKM.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah pendidikan berpengaruh terhadap penerapan SAK-EMKM.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah sosialisasi berpengaruh terhadap penerapan SAK-EMKM.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah skala usaha berpengaruh terhadap penerapan SAK-EMKM.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah lama usaha berpengaruh terhadap penerapan SAK-EMKM.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan seperti berikut ini:

1. Bagi pihak UMKM
 - a. Para pelaku UMKM akan mengetahui, memahami dan menerapkan Standar Akuntansi yang seharusnya diterapkan dan digunakan dalam pembukuan yang telah dilakukan oleh mereka
 - b. Dapat memberikan informasi tentang bagaimana cara yang benar yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku UMKM dalam pencatatan pembukuan
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Dapat mengetahui faktor-faktor/ hal yang mendorong penyebab para pelaku UMKM di kabupaten Kudus menerapkan SAK-EMKM
3. Bagi pihak Pemerintah/Dinas terkait
 - a. Pihak Pemerintah atau pun Dinas dapat mengetahui seberapa jauh para pelaku UMKM telah menggunakan SAK-EMKM